

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

PKL merupakan salah satu program pada perguruan tinggi yang dapat mendukung keselarasan antara kemampuan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Selain itu, PKL juga bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan untuk memasuki dunia kerja. Program tersebut juga merupakan langkah untuk menyiapkan tenaga kerja yang potensial. Selama melakukan PKL, praktikan mendapatkan berbagai pengalaman yang nyata dalam lingkungan kerja

Selama kurang lebih dua bulan melaksanakan PKL di BPKD Provinsi DKI Jakarta, maka Praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktikan memiliki kesempatan untuk membantu Bidang Akuntansi untuk melaksanakan proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Khususnya praktikan dalam mengetahui lebih dalam mengenai sistem informasi yang digunakan oleh pihak BPKD, mengetahui alur belanja BLUD, dan lebih mengetahui mengenai transaksi non tunai.
2. Praktikan dapat mengaplikasikan ilmu akuntansi khususnya Akuntansi Pemerintahan, yang selama ini dipelajari dalam dunia perkuliahan dan dapat mengaplikasikannya dalam dunia pekerjaan sesungguhnya
3. Praktikan dapat mengetahui proses pengelolaan keuangan daerah secara detail dan mendalam dan tidak hanya teori yang di dapat semata dan

dapat membandingkan antara realita di dunia kerja dengan teori di perkuliahan.

4. Praktikan dapat mempelajari bagaimana kehidupan lingkungan kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, baik dalam hal personal maupun pekerjaan.
5. Dengan PKL, praktikan mendapatkan banyak sekali ilmu *softskill* dan *hardskill* yang sebenarnya praktikan butuhkan untuk menghadapi dunia kerja yang nyata nanti. Khususnya dalam sistem SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) DKI Jakarta, praktikan mendapatkan banyak sekali ilmu yang telah diberikan oleh Kepala Sub Bidang dan Kepala Bidang.
6. Praktikan dapat mengerti akun-akun belanja per pos dan merekonsiliasikannya dengan baik secara praktik langsung dilapangan.

## **B. Saran**

Praktikan menyadari adanya kekurangan selama melaksanakan PKL di BPKD Provinsi DKI Jakarta. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh praktikan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja praktikan serta menjadi acuan untuk meminimalisir kekurangan dari pelaksanaan PKL kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktikan Selanjutnya
  - a. Praktikan harus aktif bertanya kepada Staf, Kepala Sub Bidang atau Kepala Bidang jika mengalami kesulitan, karena banyaknya

pekerjaan dan jenis pekerjaan yang bersifat penting dan *deadline* yang nantinya dapat menjadi tekanan terhadap praktikan jika praktikan tidak aktif bertanya.

- b. Praktikan harus cepat beradaptasi terhadap dunia kerja khususnya dibagian pemerintahan, karena jika praktikan tidak cepat beradaptasi dapat menghambat praktikan dalam pelaksanaan kerja, membuat kurang bersemangat sehingga membuat praktikan dan lalai dalam pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan oleh kepala bidang.

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta

- a. Seharusnya diberi pengarahan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan PKL sehingga praktikan tidak bingung dalam mengurus surat, pelaksanaan waktu PKL dan lain sebagainya.
- b. Bagi pihak Universitas, khususnya pada Program Studi S1 Akuntansi, diharapkan memberikan dosen pembimbing kepada praktikan sebelum melaksanakan PKL, sehingga praktikan bisa mendapatkan bimbingan dan arahan yang lebih maksimal.

3. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta

- a. Sistem informasi SIPKD masih harus diperbaiki karena masih banyak ketidaksesuaian antara hasil laporan keuangan yang satu dengan laporan lainnya, contohnya Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran yang nominalnya masih berbeda padahal seharusnya sama, hal ini bisa dilakukan dengan berita

acara rekonsiliasi, dan juga masih banyak SKPD yang melakukan transaksi jurnal yang masih salah akun dalam menginput jurnal atau *double* catat.

- b. Pencatatan dana BLUD juga harus lebih diperhatikan dalam akun belanja (pengeluaran) BLUD karena masih ada SKPD yang memiliki ketidaksesuaian nominal antara Mutasi Kas di BPKD dengan Laporan Belanja yang diberikan oleh SKPD di tahun berjalan sehingga menimbulkan saldo selisih dan harus dilakukan koreksi.